

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



### Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012

**Kupang, Senin (10 Juni 2013)** – Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang terkait lainnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, **B. Dwita Pradana** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang TA 2012 kepada Ketua DPRD Kota Kupang, **Talendmark Daud** dan Walikota Kupang, **Jonas Salean** di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang pada hari ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan terdiri dari LHP Laporan Keuangan yang memuat Opini atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, dan LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan satu kesatuan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan memperhatikan **kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.**

Opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2012 adalah *Wajar Dengan Pengecualian*. Pengecualian tersebut terkait dengan: **(1) Akun Kas di Kas daerah**, per 31 Desember 2012 sebesar Rp71.970.160.501,69 dimana terdapat satu buah deposito milik Pemerintah Kota Kupang No.004819-9 senilai Rp1.750.000.000 atas nama KPN Maju. Deposito tersebut digunakan sebagai jaminan kredit tambahan modal kerja KPN Maju untuk kegiatan finishing rumah bagi warga dan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II di lingkungan Pemerintah Kota Kupang; **(2) Piutang Pajak**, dilaporkan sebesar Rp2.966.367.484,00 yang penyajiannya belum didukung dengan: pencatatan pelunasan piutang dan denda keterlambatan yang akurat dan benar, pencatatan pajak reklame, pelaksanaan *self assesment system* yang belum optimal sehingga menimbulkan kehilangan kesempatan penetapan pajak daerah minimal sebesar Rp1.146.766.875,90 dan rincian penjualan rekening listrik sebagai dasar pengenaan PPJ (Pajak Penerangan Jalan); **(3) Aset Tetap**, per 31 Desember 2012 disajikan sebesar Rp1.578.095.092.026,00. Saldo Aset Tetap tersebut belum didukung dengan Daftar Aset Tetap, dan pemanfaatan aplikasi SIMBADA secara optimal; **(4) Saldo Investasi Permanen**, per 31 Desember 2012 pada PD Pasar sebesar Rp8.905.277.406,00 disajikan berdasarkan nilai ekuitas bersih pada kas PD Pasar yang belum diaudit oleh auditor independen; **(5) Realisasi Belanja Modal**, untuk Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan buku yang tidak sesuai kontrak minimal sebesar Rp345.618.000,00 dan diantaranya berindikasi kerugian negara minimal sebesar Rp215.254.200,00 serta terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp17.280.900,00.

Opini LKPD Kota Kupang TA 2008-2012		
TA	Opini	
2008	Wajar	dengan Pengecualian
2009	Wajar	Dengan Pengecualian
2010	Wajar	Dengan Pengecualian
2011	Wajar	Dengan Pengecualian
2012	Wajar	Dengan Pengecualian

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat (5), hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang **tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima**, sebagaimana dimuat dalam pasal 20 ayat (3) UU tersebut.

Pada kesempatan ini juga, Kepala Perwakilan menyampaikan hal-hal terkait percepatan implementasi e-Audit dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam mengelola keuangan daerah adalah aplikasi SIMBADA.

#### Informasi lebih lanjut:

Sdr. Erwin Wahyutrianto, S.H. (Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT)  
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur  
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : E.Wahyutrianto@bpk.go.id